



TRANSPARANSI
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
INOVASI
INKLUSIF



Kementerian PPN/
Bappenas



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

Resume Monitoring dan Evaluasi Semester I (B06) Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (Open Government) Indonesia VII Tahun 2023-2024



Komitmen 1:

Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
LKPP	UK 1: Publikasi transaksi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah di e-katalog	B06: Dilaksanakannya rapat yang membahas komponen informasi transaksi e-katalog yang akan dipublikasi bersama dengan masyarakat sipil	CA 100%
			PK Aktif
ICW & TII	UK 1: Mendorong publikasi transaksi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah di e-katalog	B06: Adanya diskusi untuk menyepakati komponen informasi transaksi yang harus dipublikasi K/L/PD di e-katalog	CA 100%
			PK Aktif
LKPP	UK 2: Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat	B06: Pembahasan terkait komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE dengan melibatkan masyarakat sipil	CA 100%
			PK Aktif
ICW	UK 2: Mendorong publikasi lebih rinci informasi pengadaan darurat	B06: Keterlibatan dalam diskusi untuk menyepakati informasi yang perlu dipublikasi dalam kanal PBJ darurat	CA 100%
			PK Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

LKPP

UK 1: Diskusi dilaksanakan pada beberapa unit kerja PBJ di K/L/PD & bersama ICW

UK 2: Diskusi pembahasan informasi pengadaan darurat dilakukan secara ko-kreasi

ICW

UK 1: diskusi dilaksanakan terkait RUU PBJ, tetapi belum ada pembahasan yang fokus pada penyepakatan komponen informasi yang perlu ditambahkan dalam e-katalog

UK 2: Diskusi dilaksanakan dengan ko-kreasi antara LKPP dan OMS



Komitmen 1:

Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP	UK 3: Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat	B06: Persiapan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem epengaduan	CA	100%
			PK	N/A
ICW	UK 3: Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat	B06: Tidak ada target	CA	Tidak ada target
			PK	Tidak ada target
LKPP	UK 4: Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka	B06: Pembahasan terkait data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKAP dengan melibatkan OMS	CA	100%
			PK	Aktif
ICW	UK 4: Mendorong pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka	B06: Koordinasi dengan LKPP mengenai data kinerja penyedia yang akan terpublikasi di SIKAP	CA	100%
			PK	Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

LKPP

UK 3: Sampai dengan 31 Mei 2023, terdapat 83 Inspektorat K/L/PD yang telah bergabung dalam sistem e-pengaduan.

UK 4: data SIKaP telah terhubung dengan data BO yang ada di BO.AHU.go.id

ICW

UK 4: Pembahasan terkait pengembangan data kinerja penyedia dalam SIKaP telah dilaksanakan bersama masyarakat sipil



Komitmen 1:

Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP	UK 5: Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP	B06: 1. Pembahasan terkait informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP dengan melibatkan OMS 2. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama	CA 100%
			PK Aktif
ICW	UK 5: Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP	1. Adanya diskusi untuk menyepakati informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP 2. Adanya diskusi terkait mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama	CA 100%
			PK Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

LKPP

UK 5: telah dilaksanakan diskusi awalan yang membahas mengenai informasi yang wajib dibuka sesuai Perki SLIP serta mekanisme kode unik

ICW

UK 5: ICW akan mengkaji lebih lanjut terkait pembahasan DIP & DIK serta mekanisme kode unik, diharapkan dapat menyertakan pula argumentasi dan manfaat ke depan.



Komitmen 1:

Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP	UK 6: Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	B06: Pembahasan MOU antara LKPP dengan OMS	CA	100%
			PK	Aktif
ICW	UK 6: Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	B06: Pembahasan MoU antara LKPP dengan OMS	CA	100%
			PK	Aktif
KIP	UK 7: Implementasi informasi PBJ Pemerintah menurut Perki 1/2021	B06: Review Indikator Pengadaan Barang/Jasa untuk Monev Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan masyarakat sipil	CA	80%
			PK	Semi-Aktif
ICW	UK 7: Mendorong implementasi informasi PBJ Pemerintah menurut Perki 1/2021	B06: Review Indikator Pengadaan Barang/Jasa untuk Monev Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan masyarakat sipil	CA	80%
			PK	Semi-Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

LKPP

UK 6: Telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara LKPP dengan ICW dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dalam kegiatan Open Government Week 2023.

KIP

UK 7: Indikator PBJ pada monev keterbukaan informasi publik diharapkan dapat direview secara mendalam dengan masyarakat sipil, walau sudah diedarkan harapannya review yang dilakukan bisa menjadi input untuk pelaksanaan monev di tahun berikutnya. masyarakat sipil.

ICW

UK 6: adanya MoU antara LKPP, ICW, dan IAPI



Komitmen 2:

Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian	
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK)	UK 1: Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership	B06: Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing-Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018)	CA	20%
			PK	Aktif
1. Kantor Staf Presiden 2. PPATK 3. Kementerian Hukum dan HAM	UK 1: Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership	B06: Laporan review Sectoral Risk Assessment (SRA) Data BO	CA	100%
			PK	Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

Kumham & Stranas PK

UK 1: Belum dilaksanakan review terkait pembahasan pokok-pokok revisi dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018. – Laporan diambil dari Laporan Triwulan 1 Stranas PK

KSP, PPATK, Kumham

UK 1: Kementerian/Lembaga telah mengeluarkan Laporan Sectoral Risk Assessment Data BO



Komitmen 2:

Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
1. KESDM 2. KLHK 3. Kementan 4. Kementerian ATR/BPN 5. KemenKOP dan UKM 6. Kemendag 7. Kemenkumham 8. Stranas -PK 9. BKPM 10.OJK 11.LKPP 12.Kemenkeu	UK 1: Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership	B06: Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing - Masing Institusi	CA <div>0%</div>
			PK <div>Aktif</div>
1. PWYP 2. ICW 3. Transparency International Indonesia	UK 1: Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership	B06: 1. Keterlibatan CSO dalam Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing - Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018) 2. Penyusunan Kajian Kepatuhan Korporasi Dalam Deklarasi BO	CA <div>100%</div>
			PK <div>Aktif</div>

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

**KESDM, KLHK, Kementan,
KemenATR/BPN, KemenKOP UKM,
Kemendag, Kumham, Stranas PK, BKPM,
OJK, LKPP, Kemenkeu**

UK 1: Belum ada pengumpulan basis data
BO yang terstandarisasi

PWYP, ICW, TII

UK 1: OMS terlibat dalam diskusi
pembahasan butir-butir revisi
Permenkumham terkait tata cara
Verifikasi Data BO dan telah membuat
kajian terkait data BO korporasi dalam
lingkup perusahaan sawit di Indonesia



Komitmen 3: Pelindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian	
Komnas HAM	UK 1: Keterlibatan dalam Penyusunan Kajian Rekomendasi Kepastian Pelindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan	1. Memberikan masukan atas data ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan yang merupakan basis data penyusunan outline kajian 2. FGD yang membahas mengenai ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan	CA	0%
			PK	Pasif
Kepolisian RI	UK 1: Keterlibatan dalam Penyusunan Kajian Rekomendasi Kepastian Pelindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan	Menerima data mengenai peristiwa yang dianggap sebagai ancaman terhadap pembela lingkungan	CA	100%
			PK	Aktif
Auriga Nusantara	Penyusunan Kajian Rekomendasi Kepastian Pelindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan	1. Tersedianya masukan mengenai data ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan 2. Keterlibatan dalam FGD dan penyusunan outline kajian kepastian pelindungan hukum bagi pembela lingkungan	CA	100%
			PK	Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

Komnas HAM

UK 1: Belum ada kerbejalaran komitmen dalam UK 1 yang dilaksanakan oleh Komnas HAM. Hal ini dikarenakan masih samarnya Unit Kerja yang mengampu komitmen ini. Sementara itu, pendekatan ko-kreasi yang dilakukan, ketua Komnas HAM pernah diundang sebagai narasumber dalam OG Week oleh Auriga.

Kepolisian RI

UK 1: Komitmen dijalankan dengan Kepolisian memberi masukan terhadap data yang dimiliki Auriga.

Auriga Nusantara

UK 1: Ko-kreasi telah dilaksanakan dalam sesi diskusi yang dilaksanakan Auriga pada OG Week 2023



Komitmen 4:

Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
Kemenkominfo	UK 1: Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L	B06: Tidak Ada Target	CA Tidak ada target
			PK Tidak ada target
Yayasan TIFA	UK 1: Keterlibatan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L	B06: Tidak Ada Target	CA Tidak ada target
			PK Tidak ada target

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi



Komitmen 4:

Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
Kemenkominfo	UK 2: Diterimanya rekomendasi peraturan turunan UndangUndang Pelindungan Data Pribadi mengenai pengendali data gabungan dari masyarakat sipil	B06: Penyelenggaraan penyusunan kajian partisipatoris untuk proses penyusunan rekomendasi peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	CA 70%
			PK Aktif
Yayasan TIFA	UK 2: Penyusunan rekomendasi peraturan turunan UndangUndang Pelindungan Data Pribadi mengenai pengendali data gabungan	B06: 1. Konsultasi publik untuk menjaring masukan publik terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai peran lembaga PDP dalam pengaturan transfer data ke luar negeri terlaksana 2. Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan	CA 100%
			PK Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

Kemenkominfo

UK 1: Telah memberikan masukan terhadap kajian partisipatoris yang dilakukan oleh TIFA.

Yayasan TIFA

UK 1: Kajian partisipatoris telah disusun, substansi rekomendasi ditujukan dalam konteks peraturan turunan pengendali data gabungan.



Komitmen 4:

Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
Kemenkominfo	UK 3: Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri	B06: 1. Terlaksananya Konsultasi publik untuk menjangar masukan publik terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai peran lembaga PDP dalam pengaturan transfer data ke luar negeri 2. Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan	CA 0%
			PK Pasif
Yayasan TIFA	UK 3: Tersedianya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri	B06: Tidak ada target	CA Tidak ada target
			PK Tidak ada target

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

Kemenkominfo

UK 3: Tidak dilakukannya pengumpulan data dukung sampai dengan periode pelengkapan data setelah multi-stakeholder forum



Komitmen 4:

Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
Kemenkominfo	UK 4: Keterlibatan dalam forum diskusi multipihak dalam membahas perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP	B06: Tidak ada target	CA Tidak ada target
			PK Tidak ada target
Yayasan TIFA	UK 4: Pelaksanaan forum diskusi multipihak dalam membahas perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP	B06: Tidak ada target	CA N/A
			PK N/A

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi



Komitmen 5:

Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari Disinformasi

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
Bawaslu	UK 1: Tersusunnya mekanisme penanganan pengaduan Disinformasi dalam Pemilihan Umum	B06: Adanya draft mekanisme penanganan panduan Disinformasi dalam Pemilu 2024	CA 100%
			PK Aktif
KOPEL	UK 1: Tersusunnya mekanisme penanganan pengaduan Disinformasi dalam Pemilihan Umum	B06: 1. Audiensi untuk menyampaikan policy brief pentingnya panduan penanganan pengaduan disinformasi dalam Pemilu 2. Adanya poin-poin masukan untuk mekanisme penanganan pengaduan disinformasi	CA 100%
			PK Aktif
Bawaslu	UK 2: Pelaksanaan Forum Multistakeholder dalam penyusunan mekanisme penanganan pengaduan Disinformasi	Keterlibatan dalam Forum Multistakeholder dalam rangka Penyusunan Mekanisme Penanganan Disinformasi Pemilu	CA 100%
			PK Aktif
KOPEL	UK 2: Pelaksanaan Forum Multistakeholder dalam penyusunan mekanisme penanganan pengaduan Disinformasi	Memfasilitasi Forum multistakeholder memberikan masukan pada draft mekanisme penanganan pengaduan disinformasi	CA 100%
			PK Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

Bawaslu

UK 1: Bawaslu telah membuat mekanisme penanganan disinformasi Pemilu melalui platform “Jarimu Awasi Pemilu.”

UK 2: Bawaslu telah terlibat dalam Forum Multistakeholder yang diselenggarakan oleh KOPEL.

KOPEL

UK 1: KOPEL telah menyusun policy brief dan menyampaikan poin-poin penanganan pengaduan disinformasi

UK 2: KOPEL telah melaksanakan forum multistakeholder & ko-kreasi dilaksanakan melalui audiensi



Komitmen 6:

Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
Komisi Pemilihan Umum	UK 1: Tersedianya Data Pemilu dalam format data terbuka (open data)	B06: Tersedianya Data Profil Partai Politik Peserta Pemilu (SIPOL) Tersedianya data peta daerah pemilihan dalam format data terbuka (SIDAPIL)	CA 100%
			PK Aktif
Perludem	UK 1: Terselenggaranya workshop dengan penyelenggara Pemilu dan Masyarakat Sipil untuk menyusun rekomendasi jenis-jenis data dalam setiap dataset Pemilu	B06: Terselenggaranya workshop dengan masyarakat sipil dan komunitas teknologi untuk menyusun rekomendasi strategi penyediaan serta pemanfaatan data Pemilu	CA 80%
			PK Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

Komisi Pemilihan Umum

UK 1: KPU telah membuka Informasi Partai Politik dan Informasi Peta Daerah Pemilihan (DAPIL). Portal tersebut dapat diakses oleh publik melalui portal info pemilu.

Perludem

UK 1: Perludem belum menyelenggarakan kegiatan Workshop yang melibatkan penyelenggara Pemilu. Workshop akan diselenggarakan pada Oktober 2024, sesuai dengan waktu yang disepekat bersama dengan KPU



Komitmen 7:

Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
Kemen-kominfo	UK 1: Tersusunnya pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital	B06: Merumuskan pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital	CA 100%
			PK Aktif
Suarise	UK 1: Tersusunnya pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital	B06: Melakukan penyusunan pemetaan permasalahan dan gambaran singkat terkait kondisi aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas	CA 100%
			PK Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

Kemenkominfo

UK 1: Kokreasi sudah dilakukan melalui dilibatkannya Suarise dalam rapat penyusunan, serta kerjasama dalam kegiatan FGD untuk penyusunan pedoman layanan komunikasi ramah disabilitas

Suarise

UK 1: Suarise telah melakukan pemetaan permasalahan terkait aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas



Komitmen 8:

Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
Kemendagri	UK 1: Publikasi APBDes dan pertanggungja waban APBDes melalui website desa	B06: Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa	CA 100%
			PK Aktif
Transparency International Indonesia	UK 1: Publikasi APBDes dan pertanggungja waban APBDes melalui website desa	B06: 1. Pendampingan aparat desa dalam penguatan keterbukaan informasi publik 2. Peningkatan kapasitas aparat desa	CA 100%
			PK Aktif
Kemendagri	UK 2: Penguatan warga dalam pengawasan keuangan desa	B06: Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa	CA 0%
			PK N/A
Transparency International Indonesia	UK 2: Penguatan warga dalam pengawasan keuangan desa	B06: Adanya kelompok masyarakat yang aktif mengawasi keuangan desa	CA 100%
			PK Pasif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

Kemendagri

UK 1: Kemendagri terlibat sebagai narasumber dalam pengawasan keuangan desa

UK 2: Tidak teridentifikasi bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh Kemendagri

TII:

UK 1: Telah dilakukan pendampingan kepada aparat desa untuk keterbukaan informasi keuangan desa di daerah pilot

UK 2: TII Telah menyusun kelompok masyarakat keuangan desa di daerah piloting



Komitmen 9:

Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
Kemendes PDDT	UK 1: Implementasi akuntabilitas sosial dalam proses musyawarah desa	B06: Persiapan Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	CA 100%
			PK Aktif
OMS (WVI)	UK 1: Implementasi akuntabilitas sosial dalam proses musyawarah desa	B06: 1. Tersedianya kajian & Juknis akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa. 2. Diadakannya dialog/diskusi publik mengenai akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa	CA 100%
			PK Aktif
Kemendes PDDT	UK 2: Implementasi metode Program Review dalam proses pembangunan pemerintah di tingkat desa	B06: Persiapan Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	CA 100%
			PK N/A
OMS (Yayasan TIFA)	UK 2: Implementasi metode Program Review dalam proses pembangunan pemerintah di tingkat desa	B06: Tersedianya peraturan di tingkat desa yang mendukung dan mengesahkan pelaksanaan Program Review sebagai metode mendukung Akuntabilitas Sosial.	CA 100%
			PK Pasif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

Kemendes PDDT

UK 1: Telah dilakukan audiensi dengan kemendesa untuk pelaksanaan akuntabilitas sosial

UK 2: Tidak dilibatkan dalam kegiatan Program Review

OMS (WVI & TIFA)

UK 1: Kajian dan dialog publik telah dilaksanakan

UK 2: Telah tersedia peraturan tingkat desa yang dibantu oleh yayasan TIFA, namun ko-kreasi tidak terjalin dengan Kemendesa



Komitmen 10:

Terlaksananya Proses Penyusunan RUU KKR untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran bagi Korban Pelanggaran HAM

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
BPHN	UK 1: Tersedianya Naskah Akademik (NA) RUU KKR sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu	B06: Tidak ada target	CA Tidak ada target
			PK Tidak ada target
OMS (Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, KontraS Aceh)	UK 1: Adanya policy paper mengenai KKR dari masyarakat sipil sebagai salah satu dasar pemikiran untuk mendukung kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu	B06: Adanya proses penyusunan policy paper dari masyarakat sipil untuk mendukung penyusunan NA dan draf RUU KKR	CA 100%
			PK Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

UK 1:
Telah dilakukan proses penyusunan policy paper yang dokumennya terdiri atas muatan mengenai prinsip-prinsip penghapusan impunitas, catatan dan refleksi kritis pelaksanaan di berbagai negara, dan usulan pembentukan komite pengungkapan kebenaran dalam konteks Indonesia saat ini. Tindak lanjutnya Perlu ada diskusi antar Kementerian/Lembaga dan OMS pelaksana mengenai waktu dan capaian komitmen agar sesuai dan relevan dengan dinamika pemulihan HAM berat di Indonesia yang sedang dijalankan Pemerintah.



Komitmen 11:

Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
Kejaksanaan Agung	UK 1: Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum	B06: Terlaksananya peluncuran pedoman penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan	CA 80%
			PK Aktif
IIRS	UK 1: Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum	B06: Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum di Kejaksaan berdasarkan masukan dari masyarakat sipil	CA 80%
			PK Aktif
Kejaksanaan Agung	UK 2: Adanya monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	B06: Adanya diskusi awalan antara Kejaksaan dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	CA 30%
			PK Semi-Aktif
MA		B06: Adanya diskusi awalan antara MA dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	CA 100%
			PK Aktif
OMS (IIRS, PBHI, LBH APIK)		B06: Adanya diskusi awalan antara Kejaksaan dan MA dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	CA 51%
			PK Semi-Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

Kejaksanaan Agung

UK 1: Telah diluncurkan Pedoman Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

UK 2: UK baru dikomunikasikan antar pihak secara awalan, namun belum ada diskusi mengenai teknis pelaksanaan monev dan tindak lanjutnya.

OMS

UK 2: OMS belum melakukan diskusi awalan terkait rencana monitoring dan evaluasi penanganan perempuan dan anak dengan Kejaksaan



Komitmen 11:

Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
Kejaksaan Agung	UK 3: Adanya evaluasi terhadap implementasi dari digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	B06: Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	CA <div>100%</div>
			PK <div>Aktif</div>
Kepolisian RI		B06: Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	CA <div>100%</div>
			PK <div>Aktif</div>
MA		B06: Adanya diskusi kajian OMS awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	CA <div>100%</div>
			PK <div>Aktif</div>
OMS (IJRS, PBHI, LBH APIK)		B06: 1. Adanya diseminasi hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan 2. Adanya diskusi awalan antara OMS dengan Kejaksaan, Kepolisian RI dan MA mengenai hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	CA <div>100%</div>
			PK <div>Aktif</div>

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

Kejaksaan Agung

UK 3: Kejaksaan Agung telah memberikan tanggapan terhadap pemaparan kajian OMS pada pertemuan konsultatif isu strategis akses terhadap keadilan

Kepolisian RI

UK 3: Kepolisian RI telah terlibat dalam pembahasan yang diinisiasi oleh OMS

MA

UK 3: Telah menjalankan diskusi awalan terhadap hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan.

OMS

UK 3: OMS telah menyusun kajian dan didiseminasikan, proses ko-kreasi telah terjalin antar stakeholders



Komitmen 12:

Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
BPHN	UK 1: Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	B06:Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	CA 50%
			PK Semi- Aktif
OMS (IJRS, PBHI, LBH APIK)	UK 1: Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	B06:Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	CA 0%
			PK Semi- Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

BPHN

UK 1: BPHN sudah membuat daftar dari hal-hal yang ingin dimintakan input dari OMS untuk penyusunan Panduan Asistensi Penyusunan Stopela Layanan Bantuan Hukum. Namun, BPHN belum memulai diskusi tersebut dengan OMS di periode B06.

OMS

UK 3: OMS belum menyelenggarakan diskusi dengan BPHN



Komitmen 12:

Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
BPHN	UK 2: Adanya pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi terkait bantuan hukum	B06: Adanya diskusi awalan antara BPHN dan OMS terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	CA <div>100%</div>
			PK <div>Aktif</div>
MA		B06: Adanya diskusi awalan antara MA dan OMS terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	CA <div>100%</div>
			PK <div>Aktif</div>
OMS (IJRS, PBHI, LBH APIK)		B06: Adanya diskusi awalan antara OMS dengan BPHN dan MA terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	CA <div>100%</div>
			PK <div>Aktif</div>

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

BPHN

UK 2: BPHN telah terlibat dalam diskusi awalan yang diselenggarakan OMS bersama dengan MA, dan memberikan informasi mengenai portal informasi yang ada di BPHN

MA

UK 2: Diskusi awalan telah dilaksanakan yang menghasilkan pemetaan umum terkait informasi portal bantuan hukum

OMS

UK 2: OMS akan melanjutkan proses kajian dengan melakukan wawancara mendalam kepada BPHN dan MA untuk menganalisis lebih lanjut kebutuhan informasi bantuan hukum



Komitmen 13:

Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian	
BPHN	UK 1: Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai masukan untuk Rancangan UU Bantuan Hukum (RUU Bankum)	B06: Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan	CA	100%
			PK	Aktif
OMS (IJRS, PBHI, LBH APIK)		B06: Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan	CA	100%
			PK	Aktif
BPHN	UK 2: Adanya penguatan kapasitas pemberi bantuan hukum (PBH) untuk kelompok rentan	B06: Adanya diskusi antara BPHN dengan OMS terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	CA	80%
PK			Aktif	
OMS (IJRS, PBHI, LBH APIK)		B06: Adanya diskusi antara OMS dengan BPHN terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	CA	0%
			PK	N/A

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

BPHN

UK 1: BPHN bersama dengan OMS pelaksana komitmen melakukan riset asesmen standar anggaran bantuan hukum

UK 2: BPHN telah melakukan diskusi peningkatan kapasitas PBH dengan OMS lain, yakni LBH APIK Papua

OMS

UK 1: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi serta kunjungan lapangan di Jakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur

UK 2: BPHN telah melakukan ko-kreasi dengan beberapa PBH dan OMS, meskipun bukan dengan OMS pelaksana komitmen



Komitmen 14:

Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian	
KPPA	UK 1: Tersedianya peraturan turunan terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS yang disusun dengan pelibatan masyarakat sipil	B06: Terlaksananya penyusunan draf peraturan turunan terkait UPTD PPA dengan masukan dari masyarakat sipil	CA	100%
			PK	Semi-Aktif
INFID		B06: Terlaksananya pengumpulan data persepsi warga dan operasionalisasi UU TPKS untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan mengenai UPTD PPA	CA	100%
			PK	Semi- Aktif
KPPA	UK 2: Terlaksananya perbaikan tata kelola UPTD PPA serta perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA	B06:Tidak ada target	CA	Tidak ada target
PK			Tidak ada target	
INFID		B06:Tidak ada target	CA	Tidak ada target
			PK	Tidak ada target

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

Kementerian PPPA

UK 1: Kementerian PPPA sudah melakukan penyusunan draf peraturan turunan terkait UPTD PPA.

OMS

UK 1: Terdapat tantangan dalam memulai komunikasi awalan dan melakukan update kemajuan pelaksanaan komitmen dengan Kementerian PPPA.



Komitmen 14:

Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian	
LPSK	UK 3: Tersedianya peraturan turunan terkait Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS	B06: 1. Terlaksananya kepesertaan LPSK sebagai lembaga pengusul dan pengampu dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan PP (RPP) DBK 2. Terlaksananya konsultasi publik pembahasan RPP DBK	CA	100%
			PK	Aktif
Kemenkumham		B06: 1. Tercantumnya usulan draf dalam kerangka regulasi perencanaan 2. Tersusunnya konsepsi draf yang telah teruji kelayakan konsepsi draf	CA	100%
			PK	N/A
OMS (IJRS, INFID)		B06: 1. Terlaksananya penyusunan kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan terkait DBK 2. Terlibatnya masyarakat sipil dalam konsultasi publik pembahasan RPP DBK	CA	100%
			PK	Aktif

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Temuan Pelaksanaan

LPSK

UK 3: LPSK telah menjalankan berbagai upaya ko-kreasi

Kemenkumham

UK 3: Kementerian Hukum dan HAM belum melaksanakan ko-kreasi, karena tahap pembahasan RPP DBK masih di Rapat PAK, sehingga belum dapat melibatkan masyarakat

OMS

UK 1: IJRS dan INFID juga telah terlibat dalam Diskusi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban (RPP DBK)



Komitmen 15:

Pengembangan Keterbukaan Data SDA-LH dan Tata Ruang

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian	
KLHK KESDM KATR / BPN	UK 1: Penyusunan data prioritas sektor SDA-LH yang partisipatif	B06: Penyusunan daftar data prioritas di sektor lingkungan hidup dan SDA	CA	0%
			PK	Pasif
ICEL PWYP		B06: 1. Kajian urgensi dibentuknya gugus tematik satu data SDA & LH 2. Kajian data prioritas SDA & LH	CA	0%
			PK	Pasif
KLHK KESDM KATR / BPN		B06: 1. Terlaksananya penyusunan kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan terkait DBK 2. Terlibatnya masyarakat sipil dalam konsultasi publik pembahasan RPP DBK	CA	0%
			PK	Pasif
ICEL, Media Link, PWYP Indonesia, Auriga Nusantara	UK 2: Pemetaan internal dalam K/L/D tentang masalah tata kelola Satu Data Sektor SDA-LH	B06: Penyelenggaraan diskusi kelompok terpumpun antara CSO dengan masing-masing K/L/D untuk memetakan potensi dan tantangan pelaksanaan Satu Data Sektor LH-SDA	CA	0%
			PK	Pasif

Temuan Pelaksanaan

KLHK, KESDM, KATR / BPN

UK 1-2: Tidak mengumpulkan data dukung

OMS

UK 1-2: Tidak mengumpulkan data dukung



Komitmen 15:

Pengembangan Keterbukaan Data SDA-LH dan Tata Ruang

Pelaksana	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian (B06)	Capaian
KLHK KESDM KATR / BPN	UK 3: Penyelenggaraan forum satu data di sektor SDA-LH untuk persiapan data prioritas dan standar data, dan publikasi di portal data	B06: Tidak ada target	CA <div>Tidak ada target</div>
			PK <div>Tidak ada target</div>
ICEL, Media Link, PWYP Indonesia, Auriga Nusantara		B06:Tidak ada target	CA <div>Tidak ada target</div>
			PK <div>Tidak ada target</div>
KLHK KESDM KATR / BPN	UK 2: Pemetaan internal dalam K/L/D tentang masalah tata kelola Satu Data Sektor SDA-LH	B06: Tidak ada target	CA <div>Tidak ada target</div>
			PK <div>Tidak ada target</div>

CA: Capaian Administratif, PK: Proses Ko-kreasi